

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Deah Ayu Bantari

Universitas Negeri Yogyakarta

bantarideah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (2) *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dengan Rasio Efisiensi dengan periode 2014-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2014-2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang memperoleh sampel data sebanyak 42 sampel data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (2) *Leverage* berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, (3) Belanja Daerah berpengaruh positif pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Efisiensi Kinerja, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, *Leverage*, Belanja Daerah.

Abstract: *This study aims to determine: (1) the level of dependence on the central government on the financial performance of the regional government, (2) leverage on the financial performance of the regional government, (3) regional spending on the financial performance of the regional government in the Lahat district government with an efficiency ratio with a period of 2014-2019. This research is a quantitative research. The data used is secondary data obtained from the office of the State Audit Board of South Sumatra Province. The population in this study is the Financial Position Report and Regencies/Cities in South Sumatra Province the Budget Realization Report for the 2014-2020 period which have been audited by the Supreme Audit Agency (BPK). Sampling in this study used purposive sampling method which obtained a sample of 6 data. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) the level of dependence on the central government has a negative effect on the financial performance of the regional government, (2) leverage has a positive effect on the financial performance of the regional government, (3) the regional expenditure has a positive effect on the financial performance of the regional government.*

Keywords: *local government financial performance, performance efficiency, level of dependence on the central government, leverage, regional spending.*

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah terutama pada Kabupaten/Kota sangat berperan penting atas jalannya pelaksanaan otonomi. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memahami kondisi dan permasalahan daerahnya secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan akan berjalan dengan baik dan merata.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo,2009:4).

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan perihal yang secara perlahan harus dikurangi. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat banyak dianjurkan untuk dilihat dari penerima Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan besar kecilnya pendapatan yang dimiliki suatu wilayah. Menurut PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan perimbangan yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) selain menggunakan *fiscal gap* dapat menggunakan faktor penyeimbang. Perhitungan tersebut dilakukan supaya ada keseimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja keuangan.

Menurut Kementerian Keuangan RI Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut karena adanya leverage yang dapat diartikan sebagai kewajiban maupun hutang. Leverage adalah Perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar leverage maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut (Kusumawardani, 2012). Dalam akuntansi sektor publik, leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya (Sari, 2016).

Faktor terakhir yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu belanja daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan, peneliti ingin meneliti “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang dijadikan dasar mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan menejem (*agen*). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, agen secara moral

bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan apa yang ditentukan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang No. 15 Tahun 2014 mendefinisikan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pengawas tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini, temuan audit serta simpulan dalam bentuk rekomendasi.

Akuntabilitas

Konteks dalam organisasi pemerintah sering adanya istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclousure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun di daerah harus bias menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Salah satu elemen yang menampung akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi itu dapat digambarkan sebagai “ketersediaan informasi kepada public atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara dekomkrasi”. Transparansi berarti bahwa individual, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu (Mahsun,2006).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013).

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71/2010) disebutkan bahwa pelaporan keuangan memiliki peranan sebagai “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”.

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH

Perbedaan karakteristik daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan perihal yang secara perlahan harus dikurangi. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat banyak dianjurkan untuk dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan besar kecilnya pendapatan yang dimiliki suatu wilayah.

Tingkat ketergantungan pada pusat dapat dilihat dari seberapa besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat. DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan pengeluarannya (Sedyaningsih 2015).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi

Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity).

H₁ : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Berikut adalah rumus untuk menghitungnya.

Tingkat Ketergantungan pada

$$\text{Pemerintah Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. Leverage

Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Semakin besar leverage, maka akan memperbesar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut pada pihak luar, sehingga akan menunjukkan kinerja yang rendah. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa leverage digunakan oleh pemerintah bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal, dan menanggung beban melainkan juga untuk memperbesar penghasilan.

Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar. *Leverage* merupakan proporsi total hutang

terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut adalah rumus untuk menghitungnya:

$$Leverage = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

3. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada penelitian belanja daerah dengan logaritma natural (Ln) total realisasi belanja daerah agar tidak terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem, dikarenakan besarnya total realisasi belanja masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

H₃ : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut adalah rumus untuk menghitungnya:

$$Belanja\ Daerah = \frac{Belanja\ Daerah}{Total\ Realisasi\ Belanja}$$

4. Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah "keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat". Bentuk kinerja tersebut seperti rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan dan menunjukkan tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan serta melaksanakan kegiatan pemungutan pendapatan dikategorikan secara efisien apabila rasio yang hendak dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Dengan ini maka Semakin kecil tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

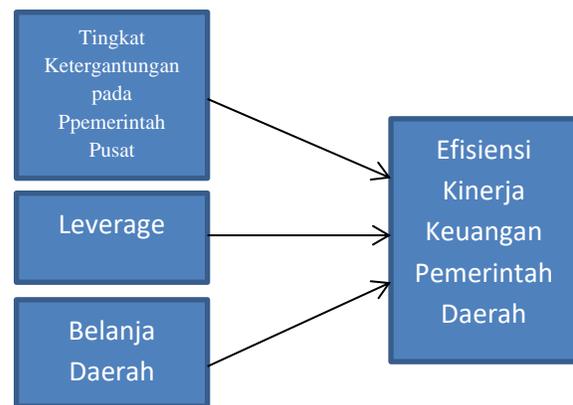
berarti tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut semakin baik.

Berikut adalah rumus menghitung Rasio Efisiensi:

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

PARADIGMA PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2014-2020. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni-September 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014-2020 dimana data ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Metode

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinasi untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian ini, yaitu tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage*, dan belanja daerah.

ANALISIS REGRESI

Teknik analisis yang digunakan peneliti untuk mengukur ada atau tidaknya linearitas antara variabel yang diteliti adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model yang digunakan dalam menentukan regresi linear berganda yaitu,

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

X₂ = *Leverage*

X₃ = Belanja Modal

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std Deviation
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	42	0,11	0,60	0,4026	0,09430
<i>Leverage</i>	42	0,00	0,10	0,0230	0,02528
Belanja Daerah	42	1,50	3,81	2,2463	0,48163
Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	42	0,70	1,19	0,9121	0,11567

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diatas, Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat memiliki nilai *mean* sebesar 0,4026, Variabel *Leverage* yang memiliki nilai *mean* sebesar 0,0230, Variabel Belanja Daerah memiliki nilai *mean* sebesar 2,2463 Dan Variabel Efisiensi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai *mean* sebesar 0,9121. Nilai standar deviasi pada kinerja keuangan.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	Nilai Kritis	Kesimpulan
Residual	0,068	0,200	0,05	Data berdistribusi secara normal

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test, dapat diketahui bahwa nilai sigifikansi atau *Asymp. Sig. (2 tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,945	1,059	Tidak terjadi Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Leverage	0,940	1,063	Tidak terjadi Multikolinearitas
Belanja Daerah	0,965	1,036	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, *Leverage*, dan Belanja Daerah memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastistas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Kesimpulan
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Daerah	0,788	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Leverage	0,368	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja Daerah	0,129	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastistas melalui

uji *rank spearman* menunjukkan nilai signifikansi dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan heteroskedastitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

dU	DW test	4 – dU	dL	Kesimpulan
1,6617	1,303	2,3383	1,3573	Tidak Terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah 2022

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Waston* adalah 1,303 yang berarti lebih besar dari dU 1,6617 dan lebih kecil dari 4-dU 2,3383, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,810	0,129		6,294	0,000
Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat	0,370	0,194	0,302	1,911	0,064
Leverage	0,259	0,724	0,057	0,358	0,722
Belanja Daerah	-0,023	0,038	-0,097	-0,623	0,537

Sumber: Data diolah 2022

Dengan melihat hasil analisis regresi linear berganda diatas dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja Keuangan} = 0,810 + 0,370 X_1 + 0,259 X_2 - 0,023 X_3$$

b. Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,058	3	0,019	1,486	0,234
Residual	0,491	38	0,013		
Total	0,549	41			

Sumber: Data diolah 2022

Hasil uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 1,486 dengan *p-value* sebesar 0,234. Nilai

F_{tabel} diketahui bernilai 2,827. Bisa dilihat bahwa $p\text{-value}$ lebih kecil dari 0,05 dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menguji hipotesis.

c. Uji T

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat nilai t_{hitung} . Selanjutnya, untuk menemukan t_{tabel} yaitu dengan syarat $t = (0,05; df/n-k)$, maka diketahui t_{tabel} adalah 1,686.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,911 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,686 ($1,911 > 1,686$) dan nilai signifikansi 0,064 yang berarti berarti lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,064 > 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 **diterima**, yang menyatakan bahwa variabel Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap Efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,358 yang berarti lebih besar dari nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,686 ($0,358 < 1,686$) dan nilai signifikansi 0,722

yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,722 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_2 **ditolak**, yang menyatakan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh positif Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil olah data

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,810	0,129		6,294	0,000
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,370	0,194	0,302	1,911	0,064
Leverage	0,259	0,724	0,057	0,358	0,722
Belanja Daerah	-0,023	0,038	-0,097	0,358	0,537

diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,623 yang berarti lebih besar dari nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,686 ($0,623 < 1,686$) dan nilai signifikansi 0,537 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 ($0,537 > 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 **ditolak**, yang menyatakan bahwa variabel Belanja daerah berpengaruh positif terhadap Efisiensi kinerja keuangan pemerintah.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien

Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,324	0,105	0,34	0,11367

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,34 nilai yang menunjukkan bahwa nilai variabel kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja dapat dijelaskan oleh variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *Leverage*, dan belanja daerah sebesar 34% dan sisanya yaitu 66% persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negative terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah karena akan

meningkatkan citra pemerintah daerah bagi masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah melakukan kegiatan operasinya tidak melewati batasan dan tidak melanggar norma, sehingga mendorong masyarakat untuk percaya terhadap sistem keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mengartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diprokasikan dengan total DAU dibandingkan dengan total pendapatan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan yang tidak berpengaruh dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut berakibat pada dana alokasi umum belum dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat lebih besar jumlah belanja daerah dari pada realisasi pendapatan yang berakibat pada kurangnya efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Saraswati (2014) yang menemukan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio utang (*leverage ratio*) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengukur seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan total utang terhadap jumlah ekuitas dana.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan *leverage* suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar hanya memiliki utang yang relatif kecil jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

memiliki dana internal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau utang dari pihak eksternal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Minarsih (2015), Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian dari Sumarjo (2010) yang menentukan hasil yaitu *leverage* berpengaruh negative terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja daerah hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayananurusan wajib dan pelayanan lain dibidang pendidikan,

kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Hubungan positif atau searah dalam hasil ini mengandung arti bahwa semakin banyak belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah maka akan baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam realisasi belanjanya telah digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, belanja daerah yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan telah digunakan sesuai fungsinya yaitu untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang telah dirancang. Pengelolaan belanja daerah secara efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016) dan Mustikarini dan Fitriani (2012) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja yang lebih baik. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Saraswati (2014) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi kinerja memiliki kinerja yang dapat dikatakan kurang efisien. Hal tersebut dapat dilihat pada sampel yang digunakan untuk data penelitian sebagian besar termasuk dalam kategori kurang efisien. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dianggap belum bijak dalam mengelola APBD.
2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan tingkat ketergantungan yang rendah kepada pusat (Dana Alokasi Umum) membuat pemerintah daerah semakin baik dalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat karena diawasi oleh pemerintah pusat.
3. *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena pemerintah tidak

banyak menggunakan utang dari pemerintah maka laba pemerintah menjadi optimal.

4. Belanja Daerah pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengalokasian belanja daerah kepada sasaran yang tepat dan dapat memberikan efisiensi belanja serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
5. Hasil dari pengujian signifikansi parameter individual (uji t) masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa (a) H_1 Diterima: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. (b) H_2 Ditolak: *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. (c) H_3 Ditolak: Belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

SARAN

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

A. Memperluas sampel penelitian yang tidak hanya menggunakan pemerintah di Kabupaten/Kota saja, tetapi juga dapat menggunakan pemerintah di Provinsi atau mencakup lebih besar agar bisa memperoleh hasil yang lebih baik dan umum.

B. Nilai *Adjusted R Square* yang relative kecil memberikan indikasi bahwa dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya berpengaruh kecil terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, demi hasil penelitian yang lebih baik, variabel lain yang

tepat perlu ditambahkan untuk penelitian selanjutnya.

C. Menggunakan indicator lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio aktivitas

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya beberapa pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera. Sebaiknya, untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel yang lebih luas.
2. Penelitian ini hanya mengamati dua faktor eksternal dan dua faktor internal. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah lagi faktor eksternal maupun internal yang memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi dari variabel dependen kinerja keuangann pemerintah daerah yaitu menggunakan Rasio Efisiensi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan atau menggunakan proksi seperti ROA, ROE, NPM dan lain lain.

4. Masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Penelitian ini hanya menggunakan 42 sampel dari laporan keuangan dari 6 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dikarenakan terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kendala mengenai izin membagikan hasil laporan keuangan yang dibutuhkan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, D. R. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb). *Jurnal Infestasi*, Vol. 11. No. 2 h:214 – 229.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). *Eksis Universitas Islam Majapahit Mojokerto*, ISSN: 1907-7513. Vol. XI, No. 1.
- Fassa, M. N. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun2014-

- 2017). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fauziah, E. (2017). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015. *Skripsi*.
- Handayani, A. R. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, ISSN: 2302-8556. Vol. 6, No. 1.
- Hatimah, K. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU. *SKRIPSI, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR*.
- KUSUFI, A. H. (2012). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. JAKARTA: PENERBIT KENCANA.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis*.
- Maiyora, G. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)". *Jom FEKON, Faculty of Economics Riau University*, Vol. 2 No. 2.
- Minarsih, R. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Mustikarini, W. A. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23 September.
- Nugroho, R. A. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Studi Empiris Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. Skripsi*.
- Oktarina, E. (2020). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah se-kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Negeri Sriwijaya.
- Oktarina, E. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Negeri Sriwijaya.
- Pramita, P. R. (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 . *Jurnal Akuntansi*.
- Saraswati, Z. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY dan Jawa Tengah. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon 3(1)*.
- Sudarsana, H. S. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Surepno. (2013). Pengaruh Return on Equity (ROE), Ukuran (Size) dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Susanti, A. (2010). Demand Supply dan Praktik Social Disclosure di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *STIE MDP 2(1): 39-51*.
- Yulianingtyas., D. S. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.